PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG

@desdmlampung

https://esdm.lampungprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2022. sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan ini memuat Latar Belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu yang berupa capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan Program dan kegiatan, telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBDP Tahun Anggaran 2022.

Bandar Lampung, Januari 2023
Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Drs. HERY SADLI, M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19690719 199003 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 12

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 13

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat..... 20

Bab III Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 26

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 26

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 27

3.3 Program dan Kegiatan 28

Bab IV Tujuan dan Sasaran 41

4.1 Matriks Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 41

Bab V Penutup 49

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Proses penyusunan Recana Kerja meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Rencana Kerja; (2) Penyusunan rancangan Rencana Kerja; (3) Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja; dan (4) Penetapan Rencana Kerja.

Rencana Kerja merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang disusun per tahun selama kurun waktu lima tahun dan dibuat pada awal tahun. Rencana Kerja memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang strategis. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun. Renca Kerja Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah melalui Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

I.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2024 berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tahun Energi;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
20. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
21. Instriksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mneral Provinsi Lampung adalah merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh dana APBDP Provinsi Lampung Tahun 2022. Rencana Kerja Perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, merupakan rencana pembangunan tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Sebagai pedoman kerja dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPASP) Perangkat Daerah serta kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2022.
2. Sebagai pedoman kerja dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) tahun 2022.
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Arah Kebijakan Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
4. Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2019-2024 yang memuat Program/Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Untuk memahami lebih jelas mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, maka uraian-uraian yang terdapat pada Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun anggaran 2022.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2022 yang didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan Dinas Enegi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 serta Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dievaluasi pada akhir tahun anggaran dan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujutan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Renja tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaks anaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Lampung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan 2021 (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10	11
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI									
3.29	BIDANG URUSAN									
3.29.01.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
3.29.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21 Dokumen**	-	-	-	-	**15 Dokumen**	**15 Dokumen**	**100%**
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen (Renstra, IKU, Renja, RKA, DPA, PK, RKT, ROK, TOR, Lakip, LPPD, LKPJ)	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
3.29.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perencanaan (RKPD), Harmonisasi dan Sinkronisasi	1 Kali	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	100%
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100%
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksanany a Administrasi Keuangan Kantor	1582 Org/Bln	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.29.01.1.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-
3.29.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**
3.29.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
3.29.01.1.05.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

3.29.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	10 orang	-	-	-	-	2 Orang	2 Orang	100%
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Penyediaan Administrasi Umum**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersediannya peralatan rumah tangga dan Listrik yang di butuhkan	25 Buah	-	-	-	-	19 Buah	19 Buah	100%
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah tersediannya barang cetakan dan penggadaan	250.000 Lembar	-	-	-	-	230.000 Lemba	212.500 Lembar	92,40%
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 buku	-	-	-	-	1 buku	1 buku	100%
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pengadaan ATK	2347 Buah	-	-	-	-	2347 Buah	2347 Buah	100%
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan minum	415 kotak	-	-	-	-	415 kotak	415 kotak	100%
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi, Jumlah Kabupaten/Kota	128 Kali	-	-	-	-	9 Kali	9 Kali	100%
3.29.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14 Unit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 Unit**	**14 Unit**	**100%**
3.29.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	7 unit	-	-	-	-	7 unit	7 unit	100%
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	7 unit	-	-	-	-	7 unit	7 unit	100%
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	-	-	-	-	1	1	100%
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan administrasi keuangan dan Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	100%	-	-	-	-	1	1	100%
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**55 Unit**	-	-	-	-	**55 Unit**	**55 Unit**	**100%**
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	8 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	-	-	-	-	49 Unit	49 Unit	100%
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%

3.29.01.2	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**100%**	-	-	-	-	**1**	**1**	**100%**
3.29.01.2.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**4 kab/kota**	-	-	-	-	**4 Lokasi**	**4 Lokasi**	**100%**
3.29.01.2.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Peningkatan Penyediaan Jumlah Data dan Informasi Konservasi Air Tanah Berbasis Cekungan	1 dokumen	-	-	-	-	4 Lokasi	4 Lokasi	100%
3.29.01.2.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Peta Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Bandar Lampung	4 Lokasi	-	-	-	-	-	-	-
3.29.01.2.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**4 kab/kota**	-	-	-	-	**4 Lokasi**	**4 Lokasi**	**100%**
3.29.01.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan, serta terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah.	4 Lokasi	-	-	-	-	4 Lokasi	4 Lokasi	100%
3.29.01.3	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Mineral dan Batubara**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
3.29.03.1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**7 dokumen**	-	-	-	-	**7 dokumen**	**7 dokumen**	**100%**
3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas	7 dokumen	-	-	-	-	7 dokumen	7 dokumen	100%
3.29.03.1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**	**Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**	**22 Perusahaan**	-	-	-	-	**22 Perusahaan**	**22 Perusahaan**	**100%**
3.29.03.1.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	11 Perusahaan	-	-	-	-	11 Perusahaan	11 Perusahaan	100%

3.29.01.3.03. 04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Pengawasan Teknis kaidah Pertambanga n yang baik Perizinan Usaha Pertambanga n Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	11 Perusahaan	-	-	-	-	11 Perusahaan	10 Perusahaan	90,90%
3.29.01.5	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Terbarukan**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
3.29.01.5.03	**Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**	**Jumlah Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang tertatausahakan selama 1 Tahun**	**12 Bulan**	-	-	-	-	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%
3.29.01.5.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah koordinasi sektor migas yang dilaksanakan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.29.01.5.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	DaerahJumlah dokumen data guna penyusunan Neraca Energi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah dokumen data potensi bioenergi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Jumlah fasilitas milik Pemerintah yang akan dilakukan efisiensi Energi Listrik	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
3.29.01.6	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
3.29.01.6.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**6 Kali**	-	-	-	-	**6 Kali**	**6 Kali**	**100%**

3.29.01.6.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan Usaha dan Infrastruktur Ketenagalistri kan	6 Kali	-	-	-	-	6 Kali	6 Kali	100%
3.29.01.6.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Penataan Izin Operasi selama 1 Tahun**	**12 Kali**	-	-	-	-	**12 Kali**	**12 Kali**	**100%**
3.29.01.6.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan K3L Usaha Ketenagalistri kan di Provinsi Lampung	12 Kali	-	-	-	-	12 Kali	11 Kali	91,66%
3.29.01.6.05	**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri**	**Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun**	**7 dokumen**	-	-	-	-	**7 dokumen**	**7 dokumen**	**100%**
3.29.01.6.05.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah Dokumen Sub teknis urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas	7 dokumen	-	-	-	-	7 dokumen	7 dokumen	100%
3.29.01.6.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun**	**13 kab/kota**	-	-	-	-	**13 Kabupaten**	**13 Kabupaten**	**100%**
3.29.01.6.06.2	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	13 kab/kota	-	-	-	-	5 Lokasi	0 Lokasi	0%
3.29.01.6.06.4	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	13 kab/kota	-	-	-	-	13 Kabupaten	13 Kabupaten	100%
3.29.01.6.06.7	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kabupaten di Provinsi lampung yang terdata untuk Dusun yang belum berlistrik serta Evaluasi Potensi Sumber EBT pada Dusun yang belum Berlistrik.	13 kab/kota	-	-	-	-	13 Kabupaten	13 Kabupaten	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada sasaran strategis dan Indikator-indikator yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama dalam rangka untuk Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung.

Gambar 2.1

Grafik Capaian Indikator Kinerja T.A 2020-2021

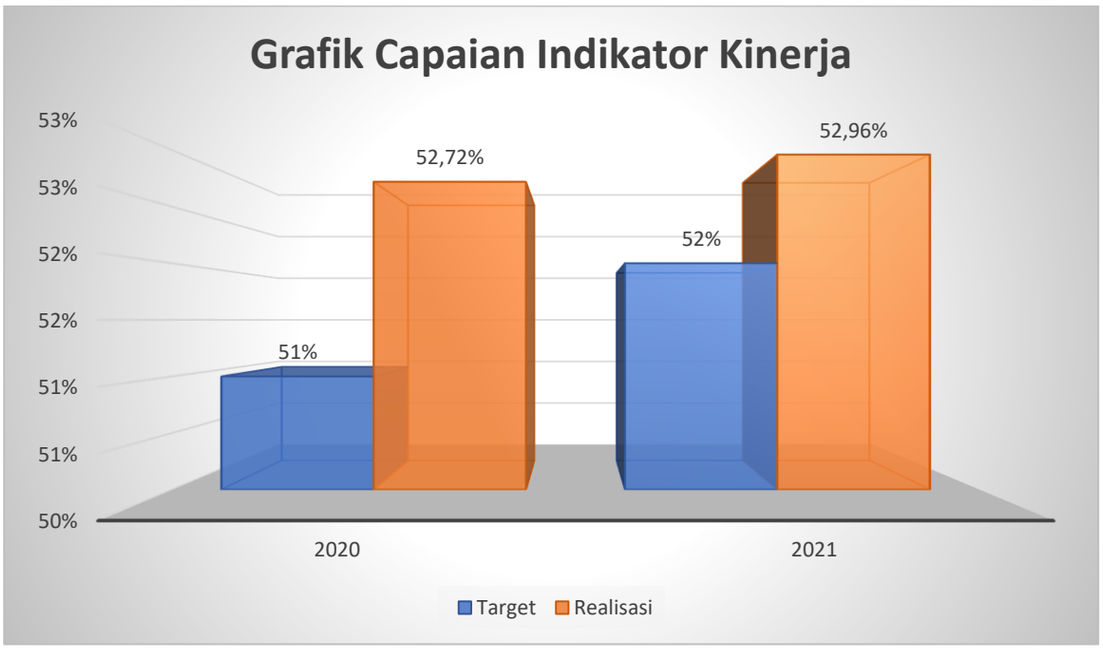

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tidak terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain:

1. Masih ada beberapa wilayah yang belum teraliri listrik;
2. Potensi energi baru terbarukan di Provinsi Lampung cukup besar, namun pemanfaatanya belum optimal, sementara pengembangan energi panas bumi masih mengalami kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan dan kurangnya dukungan infrastruktur;
3. Masih rendahnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB;
4. Rendahnya kontribusi sektor LGA terhadap PDRB;

5. Selama ini anggapan sebagian masyarakat terhadap kegiatan penambangan, dianggap merusak lingkungan. Padahal sebenarnya kegiatan usaha pertambangan hanya merubah bentang alam sesuai peruntukannya, dan bahkan hal ini selalu diisyaratkan pada saat pengajuan izin usaha pertambangan dan hal ini tercantum pada RKL/UPL dan amdal sebelum kegiatan penambangan dilaksanakan;
6. Kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) masih terjadi;
7. Jumlah dan debit mata air di Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan selama beberapa dekade ini seiring dengan banyak berubahnya fungsi lahan di daerah resapan;
8. Masih terdapat daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, untuk itu perlu dilakukan kegiatan pengeboran air tanah dalam rangka mendorong pengembangan wilayah tertinggal;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 (T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Provinsi Lampung

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (P)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 0000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 0000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI				**20.687.670.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI**				**20.713.848.381,55**	
	BIDANG URUSAN					**BIDANG URUSAN**					
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**16.848.000.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**16.576.178.381,55**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21 Dokumen**	**150.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21 Dokumen**	**150.000.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas ESDM	Jumlah dokumen (Renstra, IKU, Renja, RKA, DPA, PK, RKT, ROK, TOR, Lakip, LPPD, LKPJ)	12 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas ESDM	Jumlah dokumen (Renstra, IKU, Renja, RKA, DPA, PK, RKT, ROK, TOR, Lakip, LPPD, LKPJ)	12 Dokumen	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perencanaan (RKPD), Harmonisasi dan Sinkronisasi	1 Kali	65.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perencanaan (RKPD), Harmonisasi dan Sinkronisasi	1 Kali	65.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	35.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	35.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**	**100%**	**13.532.117.685,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**	**100%**	**13.214.466.066,55**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas ESDM	Persentase Terlaksanany a Administrasi Keuangan Kantor	1582 Org/bulan	13.507.117.685,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas ESDM	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor	1582 Org/bulan	13.189.466.066,55	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	25.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	25.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		**Persentase Peningkatan Penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**50.000.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**50.000.000,00**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	1 Dokumen	15.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	1 Dokumen	15.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**100.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**55.000.000,00**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas ESDM	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	10 orang	100.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas ESDM	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	10 orang	55.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Peningkatan Penyediaan Administrasi Umum**	**100%**	**1.012.084.915,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Penyediaan Administrasi Umum**	**100%**	**1.001.848.715,00**	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas ESDM	Jumlah tersediannya peralatan rumah tangga dan Listrik yang di butuhkan	25 Buah	15.884.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas ESDM	Jumlah tersediannya peralatan rumah tangga dan Listrik yang di butuhkan	25 Buah	39.938.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Lampung	Jumlah tersediannya barang cetakan dan penggadaan	250.000 Lembar	46.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Lampung	Jumlah tersediannya barang cetakan dan penggadaan	250.000 Lembar	46.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas ESDM	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 buku	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas ESDM	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 buku	0,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Lampung	Jumlah Pengadaan ATK	2347 Buah	168.432.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Lampung	Jumlah Pengadaan ATK	2347 Buah	64.141.800,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas ESDM	Jumlah layanan makan minum	415 kotak	25.600.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas ESDM	Jumlah layanan makan minum	415 kotak	25.600.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Lampung	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi, Jumlah Kabupaten/Kota	128 Kali	751.168.915,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Lampung	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi, Jumlah Kabupaten/Kota	128 Kali	826.168.915,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14 Unit**	**147.376.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14 Unit**	**355.737.200,00**	
	Pengadaan mebel	Provinsi Lampung	Jumlah Pengadaan Mebeleur	7 unit	97.376.000,00	Pengadaan mebel	Provinsi Lampung	Jumlah Pengadaan Mebeleur	7 unit	118.821.200,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Lampung	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	7 unit	50.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Lampung	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	7 unit	236.916.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan**	**100%**	**659.021.400,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan**	**100%**	**679.021.400,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Lampung	Jumlah terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	224.262.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Lampung	Jumlah terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	224.262.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas ESDM	Layanan administrasi keuangan dan Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	100%	434.759.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas ESDM	Layanan administrasi keuangan dan Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	100%	454.759.400,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**55 Unit**	**1.197.400.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**55 Unit**	**1.070.105.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	8 Unit	759.400.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	8 Unit	710.400.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	45.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	32.545.000,00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8 Unit	393.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8 Unit	327.160.000,00	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**100%**	**650.000.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**100%**	**650.000.000,00**	
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		**Jumlah Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**4 kab/kota**	**500.000.000,00**	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**		**Jumlah Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**4 kab/kota**	**500.000.000,00**	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Provinsi Lampung	Peningkatan Penyediaan Jumlah Data dan Informasi Konservasi Air Tanah Berbasis Cekungan	1 dokumen	150.000.000,00	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Provinsi Lampung	Peningkatan Penyediaan Jumlah Data dan Informasi Konservasi Air Tanah Berbasis Cekungan	1 dokumen	150.000.000,00	
	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Provinsi Lampung	Peta Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Bandar Lampung	4 Lokasi	350.000.000,00	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Provinsi Lampung	Peta Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Bandar Lampung	4 Lokasi	350.000.000,00	
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		**Jumlah Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**4 kab/kota**	**150.000.000,00**	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**		**Jumlah Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**4 kab/kota**	**150.000.000,00**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Provinsi Lampung	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan, serta terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah.	4 Lokasi	150.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Provinsi Lampung	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan, serta terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah.	4 Lokasi	150.000.000,00	
III	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Mineral dan Batubara**	**100%**	**255.670.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Mineral dan Batubara**	**100%**	**255.670.000,00**	
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		**Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**7 dokumen**	**140.000.000,00**	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**		**Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**7 dokumen**	**140.000.000,00**	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	15 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas	7 dokumen	140.000.000,00	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas	7 dokumen	140.000.000,00	

	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		**Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**	**22 Perusahaan**	**115.670.000,00**	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**		**Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**	**22 Perusahaan**	**115.670.000,00**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	10 Kabupaten	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambanga n Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	11 Perusahaa n	57.390.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	10 Kabupaten	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambanga n Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	11 Perusahaa n	57.390.000,00	
	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	10 Kabupaten	Jumlah Pengawasan Teknis kaidah Pertambanga n yang baik Perizinan Usaha Pertambanga n Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	11 Perusahaa n	58.280.000,00	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	10 Kabupaten	Jumlah Pengawasan Teknis kaidah Pertambanga n yang baik Perizinan Usaha Pertambanga n Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	11 Perusahaa n	58.280.000,00	
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Terbarukan**	**100%**	**1.609.790.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Terbarukan**	**100%**	**1.907.790.000,00**	
	Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun		**Jumlah Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang tertatausahakan selama 1 Tahun**	**12 Bulan**	**309.000.000,00**	**Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**		**Jumlah Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang tertatausahakan selama 1 Tahun**	**12 Bulan**	**357.000.000,00**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Provinsi Lampung	Jumlah koordinasi sektor migas yang dilaksanakan	12 Bulan	309.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Provinsi Lampung	Jumlah koordinasi sektor migas yang dilaksanakan	12 Bulan	357.000.000,00	
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		**Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**100%**	**1.300.790.000,00**	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**		**Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**100%**	**1.550.790.000,00**	

	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Provinsi Lampung	DaerahJumlah dokumen data guna penyusunan Neraca Energi	1 Dokumen	450.000.000,00	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Provinsi Lampung	DaerahJumlah dokumen data guna penyusunan Neraca Energi	1 Dokumen	700.000.000,00	
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen data potensi bioenergi	1 Dokumen	800.000.000,00	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen data potensi bioenergi	1 Dokumen	800.000.000,00	
	Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Provinsi Lampung	Jumlah fasilitas milik Pemerintah yang akan dilakukan efisiensi Energi Listrik	2 Unit	50.790.000,00	Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Provinsi Lampung	Jumlah fasilitas milik Pemerintah yang akan dilakukan efisiensi Energi Listrik	2 Unit	50.790.000,00	
V	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**100%**	**1.324.210.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**100%**	**1.324.210.000,00**	
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		**Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**6 Kali**	**250.000.000,00**	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**		**Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**6 Kali**	**250.000.000,00**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah Pembinaan Usaha dan Infrastruktur Ketenagalistri kan	6 Kali	250.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah Pembinaan Usaha dan Infrastruktur Ketenagalistri kan	6 Kali	250.000.000,00	
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		**Jumlah Penataan Izin Operasi selama 1 Tahun**	**12 Kali**	**100.000.000,00**	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**		**Jumlah Penataan Izin Operasi selama 1 Tahun**	**12 Kali**	**100.000.000,00**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah Pengawasan K3L Usaha Ketenagalistri kan di Provinsi Lampung	12 Kali	100.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah Pengawasan K3L Usaha Ketenagalistri kan di Provinsi Lampung	12 Kali	100.000.000,00	
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri		**Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun**	**7 dokumen**	**474.210.000,00**	**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri**		**Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun**	**7 dokumen**	**474.210.000,00**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	15 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Sub teknis urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas	7 dokumen	474.210.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Sub teknis urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas	7 dokumen	474.210.000,00	

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan		**Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun**	**13 kab/kota**	**500.000.000,00**	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan**		**Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun**	**13 kab/kota**	**500.000.000,00**	
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Lampung	Jumlah Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	13 kab/kota	150.000.000,00	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Lampung	Jumlah Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	13 kab/kota	150.000.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pravinsi Lampung	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	13 kab/kota	100.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pravinsi Lampung	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	13 kab/kota	100.000.000,00	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Lampung	Jumlah Kabupaten di Provinsi lampung yang terdata untuk Dusun yang belum berlistrik serta Evaluasi Potensi Sumber EBT pada Dusun yang belum Berlistrik.	13 kab/kota	250.000.000,00	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Lampung	Jumlah Kabupaten di Provinsi lampung yang terdata untuk Dusun yang belum berlistrik serta Evaluasi Potensi Sumber EBT pada Dusun yang belum Berlistrik.	13 kab/kota	250.000.000,00	
	Jumlah Pagu				**20.687.670.000,00**	**Jumlah Pagu**				**20.713.848.381,55**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung menyusun usulan program / kegiatan tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan rapat musrembang tingkat kabupaten/kota. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dapat dilihat pada. Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel 2.4 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2022 Provinsi Lampung

NO	Rancangan Awal RKPD				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI				
	BIDANG URUSAN				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21 Dokumen**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas ESDM	Jumlah dokumen (Renstra, IKU, Renja, RKA, DPA, PK, RKT, ROK, TOR, Lakip, LPPD, LKPJ)	12 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perencanaan (RKPD), Harmonisasi dan Sinkronisasi	1 Kali	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**	**100%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas ESDM	Persentase Terlaksanany a Administrasi Keuangan Kantor	1582 Org/bulan	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		**Persentase Peningkatan Penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	1 Dokumen	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas ESDM	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	10 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Peningkatan Penyediaan Administrasi Umum**	**100%**	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas ESDM	Jumlah tersediannya peralatan rumah tangga dan Listrik yang di butuhkan	25 Buah	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Lampung	Jumlah tersediannya barang cetakan dan penggadaan	250.000 Lembar	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas ESDM	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 buku	
	Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Lampung	Jumlah Pengadaan ATK	2347 Buah	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas ESDM	Jumlah layanan makan minum	415 kotak	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Lampung	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi, Jumlah Kabupaten/Kota	128 Kali	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14 Unit**	
	Pengadaan mebel	Provinsi Lampung	Jumlah Pengadaan Mebeleur	7 unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Lampung	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	7 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan**	**100%**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Lampung	Jumlah terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas ESDM	Layanan administrasi keuangan dan Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**55 Unit**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	8 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8 Unit	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**100%**	
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		**Jumlah Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**4 kab/kota**	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Provinsi Lampung	Peningkatan Penyediaan Jumlah Data dan Informasi Konservasi Air Tanah Berbasis Cekungan	1 dokumen	
	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Provinsi Lampung	Peta Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Bandar Lampung	4 Lokasi	
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		**Jumlah Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**4 kab/kota**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Provinsi Lampung	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan, serta terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah.	4 Lokasi	

III	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Mineral dan Batubara**	**100%**	
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		**Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**7 dokumen**	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas	7 dokumen	
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		**Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**	**22 Perusahaan**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	10 Kabupaten	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambanga n Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	11 Perusahaan	
	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	10 Kabupaten	Jumlah Pengawasan Teknis kaidah Pertambanga n yang baik Perizinan Usaha Pertambanga n Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	11 Perusahaan	
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Terbarukan**	**100%**	
	Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun		**Jumlah Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang tertatausahakan selama 1 Tahun**	**12 Bulan**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai	Provinsi Lampung	Jumlah koordinasi sektor migas yang dilaksanakan	12 Bulan	

	Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		**Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**100%**	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Provinsi Lampung	DaerahJumlah dokumen data guna penyusunan Neraca Energi	1 Dokumen	
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Provinsi Lampung	Jumlah dokumen data potensi bioenergi	1 Dokumen	
	Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Provinsi Lampung	Jumlah fasilitas milik Pemerintah yang akan dilakukan efisiensi Energi Listrik	2 Unit	
V	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**100%**	
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		**Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**6 Kali**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah Pembinaan Usaha dan Infrastruktur Ketenagalistri kan	6 Kali	
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		**Jumlah Penataan Izin Operasi selama 1 Tahun**	**12 Kali**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	Jumlah Pengawasan K3L Usaha Ketenagalistri kan di Provinsi Lampung	12 Kali	
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri		**Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun**	**7 dokumen**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Sub teknis urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas	7 dokumen	
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan		**Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun**	**13 kab/kota**	
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Lampung	Jumlah Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	13 kab/kota	

	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pravinsi Lampung	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	13 kab/kota	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Lampung	Jumlah Kabupaten di Provinsi lampung yang terdata untuk Dusun yang belum berlistrik serta Evaluasi Potensi Sumber EBT pada Dusun yang belum Berlistrik.	13 kab/kota	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai Instasi yang memiliki tugas melakukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Minera Provinsi Lampung selalu mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat dai juga Pemerintah Provinsi Lampung yaitu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 serta kebijakan yang termuat dalam dokumen penyusunan perencanaan yang setiap tahun diterbitkan oleh Pemerintah yang menekankan pada 7 agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024, yaitu :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam membuat dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif, teknokratik, politik serta *Top down* dan *Bottom up*. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah yang menurut kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pola Working Plan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan yang disusun dari tahapan yang memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down* ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka menjaga sinergitas perencanaan pembangunan perlu dicermati kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*"

Selain RKP 2022 penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada level provinsi yaitu RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022. Untuk mencapaian keselarasan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2022, serta selaras dengan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang bertajuk : "MEMANTAPKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN KESEHATAN SERTA PENINGKATAN SDM BERKUALITAS,"

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian Sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral lima tahun kedepan dapat lebih

fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Adapun tujuan pembangunan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung adalah "***Terwujudnya Ketahanan dan Kemadirian Energi Menuju Lampung Berjaya***".

Sasaran Pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung akan di fokuskan pada:

1. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
1	2	3	4		5
1.	Terwujudnya Ketahanan dan Kemadirian Energi Menuju Lampung Berjaya	Rasio Dusun Berlistrik (%)	1.	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung	Rasio Dusun Berlistrik

3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya Program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Lebih lanjut, penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan pada pada tahun 2022 pada dasarnya merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang direncanakan untuk periode Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Penyediaan Bahan/Material
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
2. Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

b. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

1. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

III. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

a. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

b. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
2. Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut

IV. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

a. Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

b. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
2. Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
3. Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi

V. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

a. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

b. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

c. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri

d. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan

1. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan
2. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dijabarkan pada tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Lampung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun (P) 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI**				**20.713.848.381,55**	**APBD**			**20.838.982.157,90**
3.29	**BIDANG URUSAN**								
3.29.01.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**16.576.178.381,55**	**APBD**		**100%**	**16.885.872.157,90**
3.29.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**21 Dokumen**	**150.000.000,00**	**APBD**		**21 Dokumen**	**167.356.000,00**
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen (Renstra, IKU, Renja, RKA, DPA, PK, RKT, ROK, TOR, Lakip, LPPD, LKPJ)	Dinas ESDM	12 Dokumen	50.000.000,00	**APBD**		12 Dokumen	16.126.000,00
3.29.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perencanaan (RKPD), Harmonisasi dan Sinkronisasi	Dinas ESDM	1 Kali	65.000.000,00	**APBD**		3 Dokumen	116.230.000,00
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas ESDM	6 dokumen	35.000.000,00	**APBD**		6 dokumen	35.000.000,00
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**		**100%**	**13.214.466.066,55**	**APBD**		**100%**	**13.868.099.842,90**
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksanany a Administrasi Keuangan Kantor	Dinas ESDM	1582 Org/bulan	13.189.466.066,55	**APBD**		1582 Orang/Bulan	13.857.979.842,90

3.29.01.1.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan	Dinas ESDM	12 Bulan	25.000.000,00	**APBD**		6 Laporan	10.120.000,00
3.29.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah**		**100%**	**50.000.000,00**	**APBD**		**100%**	**50.000.000,00**
3.29.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	Dinas ESDM	1 Dokumen	15.000.000,00	**APBD**		2 Laporan	15.000.000,00
3.29.01.1.05.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	1 Dokumen	35.000.000,00	**APBD**		7 Laporan	35.000.000,00
3.29.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**		**100%**	**55.000.000,00**	**APBD**		**100%**	**100.000.000,00**
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Dinas ESDM	10 orang	55.000.000,00	**APBD**		20 Orang	100.000.000,00
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Penyediaan Administrasi Umum**		**100%**	**1.001.848.715,00**	**APBD**		**100%**	**1.192.597.400,00**
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersediannya peralatan rumah tangga dan Listrik yang di butuhkan	Dinas ESDM	25 Buah	39.938.000,00	**APBD**		19 Paket	15.884.000,00
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah tersediannya barang cetakan dan penggadaan	Provinsi Lampung	250.000 Lembar	46.000.000,00	**APBD**		460 Paket	46.000.000,00
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas ESDM	1 buku	0,00	**APBD**		0	0,00
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pengadaan ATK	Provinsi Lampung	2347 Buah	64.141.800,00	**APBD**		2347 Paket	168.432.000,00
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan minum	Dinas ESDM	415 kotak	25.600.000,00	**APBD**		415 Laporan	25.775.000,00
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi, Jumlah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	128 Kali	826.168.915,00	**APBD**		148 Laporan	936.506.400,00

3.29.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**14 Unit**	**355.737.200,00**	**APBD**		**100%**	**221.480.000,00**
3.29.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Provinsi Lampung	7 unit	118.821.200,00	**APBD**		31 unit	114.214.000,00
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Provinsi Lampung	7 unit	236.916.000,00	**APBD**		31 unit	107.266.000,00
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan**		**100%**	**679.021.400,00**	**APBD**		**100%**	**724.833.915,00**
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi Lampung	100%	224.262.000,00	**APBD**		12 laporan	197.558.915,00
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan administrasi keuangan dan Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Dinas ESDM	100%	454.759.400,00	**APBD**		36 laporan	527.275.000,00
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**55 Unit**	**1.070.105.000,00**	**APBD**		**55 Unit**	**561.505.000,00**
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		8 Unit	710.400.000,00	**APBD**		6 Unit	218.080.000,00
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		12 Bulan	32.545.000,00	**APBD**		88 unit	28.425.000,00
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		8 Unit	327.160.000,00	**APBD**		1 Unit	315.000.000,00
3.29.01.2	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian**		**100%**	**650.000.000,00**	**APBD**		**56,25%**	**600.000.000,00**
3.29.01.2.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**		**4 kab/kota**	**500.000.000,00**	**APBD**		**67,5%**	**480.000.000,00**
3.29.01.2.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Peningkatan Penyediaan Jumlah Data dan Informasi Konservasi Air Tanah Berbasis Cekungan	Provinsi Lampung	1 dokumen	150.000.000,00	**APBD**		20 Dokumen	261.500.000,00

3.29.01.2.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Peta Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Bandar Lampung	Provinsi Lampung	4 Lokasi	350.000.000,00	**APBD**		1 Dokumen	218.500.000,00
3.29.01.2.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**		**4 kab/kota**	**150.000.000,00**	**APBD**		**45%**	**120.000.000,00**
3.29.01.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan, serta terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah.	Provinsi Lampung	4 Lokasi	150.000.000,00	**APBD**		10 Laporan	120.000.000,00
3.29.01.3	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Mineral dan Batubara**		**100%**	**255.670.000,00**	**APBD**		**100%**	**519.110.000,00**
3.29.03.1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**		**7 dokumen**	**140.000.000,00**	**APBD**		**7 dokumen**	**140.000.000,00**
3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas	15 Kabupaten/ Kota	7 dokumen	140.000.000,00	**APBD**		7 dokumen	140.000.000,00
3.29.03.1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**	**Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk**		**22 Perusahaan**	**115.670.000,00**	**APBD**		**22 Laporan**	**379.110.000,00**

		Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut							
3.29.03.1.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambanga n Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	10 Kabupaten	11 Perusahaan	57.390.000,00	**APBD**		11 Laporan	189.110.000,00
3.29.01.3.03. 04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Pengawasan Teknis kaidah Pertambanga n yang baik Perizinan Usaha Pertambanga n Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	10 Kabupaten	11 Perusahaan	58.280.000,00	**APBD**		11 Laporan	190.000.000,00
3.29.01.5	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Terbarukan**		**100%**	**1.907.790.000,00**	**APBD**		**100%**	**1.659.790.000,00**
3.29.01.5.03	**Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai**	**Jumlah Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang tertatausahakan selama 1 Tahun**		**12 Bulan**	**357.000.000,00**	**APBD**		**8%**	**309.000.000,00**

	Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun								
3.29.01.5.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah koordinasi sektor migas yang dilaksanakan	Provinsi Lampung	12 Bulan	357.000.000,00	**APBD**		12 Laporan	309.000.000,00
3.29.01.5.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**		**100%**	**1.550.790.000,00**	**APBD**		**100%**	**1.350.790.000,00**
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	DaerahJumlah dokumen data guna penyusunan Neraca Energi	Provinsi Lampung	1 Dokumen	700.000.000,00	**APBD**		2 Dokumen	405.000.000,00
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah dokumen data potensi bioenergi	Provinsi Lampung	1 Dokumen	800.000.000,00	**APBD**		40 Unit	795.000.000,00
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Jumlah fasilitas milik Pemerintah yang akan dilakukan efisiensi Energi Listrik	Provinsi Lampung	2 Unit	50.790.000,00	**APBD**		100%	150.790.000,00
3.29.01.6	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Ketenagalistrikan**		**100%**	**1.324.210.000,00**	**APBD**		**80%**	**1.174.210.000,00**
3.29.01.6.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**		**6 Kali**	**250.000.000,00**	**APBD**		**80%**	**250.000.000,00**

3.29.01.6.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan Usaha dan Infrastruktur Ketenagalistri kan	Provinsi Lampung	6 Kali	250.000.000,00	**APBD**		21 Laporan	250.000.000,00
3.29.01.6.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Penataan Izin Operasi selama 1 Tahun**		**12 Kali**	**100.000.000,00**	**APBD**		**80%**	**100.000.000,00**
3.29.01.6.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan K3L Usaha Ketenagalistri kan di Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	12 Kali	100.000.000,00	**APBD**		12 Laporan	100.000.000,00
3.29.01.6.05	**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri**	**Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun**		**7 dokumen**	**474.210.000,00**	**APBD**		**80%**	**474.210.000,00**
3.29.01.6.05.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah Dokumen Sub teknis urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas	15 Kabupaten/ Kota	7 dokumen	474.210.000,00	**APBD**		7 Laporan	474.210.000,00
3.29.01.6.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun**		**13 kab/kota**	**500.000.000,00**	**APBD**		**80%**	**350.000.000,00**
3.29.01.6.06.2	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Provinsi Lampung	13 kab/kota	150.000.000,00	**APBD**		0	0,00

3.29.01.6.06.4	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pravinsi Lampung	13 kab/kota	100.000.000,00	**APBD**		3 Laporan	100.000.000,00
3.29.01.6.06.7	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kabupaten di Provinsi lampung yang terdata untuk Dusun yang belum berlistrik serta Evaluasi Potensi Sumber EBT pada Dusun yang belum Berlistrik.	Provinsi Lampung	13 kab/kota	250.000.000,00	**APBD**		6 Dokumen	250.000.000,00
			Jumlah Pagu		**20.713.848.381,55**			**Jumlah Pagu**	**20.838.982.157,90**

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuh Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, dan Target Tahun 2022 serta Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perumusan Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 terdiri dari 5 Program dan 18 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang ditekankan pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi menuju lampung berjaya. Program dan kegiatan dimaksud yaitu:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun (P) 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI**				**20.713.848.381,55**	**APBD**			**20.838.982.157,90**
3.29	**BIDANG URUSAN**								
3.29.01.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**16.576.178.381,55**	**APBD**		**100%**	**16.885.872.157,90**
3.29.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**21 Dokumen**	**150.000.000,00**	**APBD**		**21 Dokumen**	**167.356.000,00**
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen (Renstra, IKU, Renja, RKA, DPA, PK, RKT, ROK, TOR, Lakip, LPPD, LKPJ)	Dinas ESDM	12 Dokumen	50.000.000,00	**APBD**		12 Dokumen	16.126.000,00
3.29.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Perencanaan (RKPD), Harmonisasi dan Sinkronisasi	Dinas ESDM	1 Kali	65.000.000,00	**APBD**		3 Dokumen	116.230.000,00
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas ESDM	6 dokumen	35.000.000,00	**APBD**		6 dokumen	35.000.000,00
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**		**100%**	**13.214.466.066,55**	**APBD**		**100%**	**13.868.099.842,90**
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksanany a Administrasi Keuangan Kantor	Dinas ESDM	1582 Org/bulan	13.189.466.066,55	**APBD**		1582 Orang/Bulan	13.857.979.842,90

3.29.01.1.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan	Dinas ESDM	12 Bulan	25.000.000,00	**APBD**		6 Laporan	10.120.000,00
3.29.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah**		**100%**	**50.000.000,00**	**APBD**		**100%**	**50.000.000,00**
3.29.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	Dinas ESDM	1 Dokumen	15.000.000,00	**APBD**		2 Laporan	15.000.000,00
3.29.01.1.05.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas ESDM	1 Dokumen	35.000.000,00	**APBD**		7 Laporan	35.000.000,00
3.29.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**		**100%**	**55.000.000,00**	**APBD**		**100%**	**100.000.000,00**
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Dinas ESDM	10 orang	55.000.000,00	**APBD**		20 Orang	100.000.000,00
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Penyediaan Administrasi Umum**		**100%**	**1.001.848.715,00**	**APBD**		**100%**	**1.192.597.400,00**
3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersediannya peralatan rumah tangga dan Listrik yang di butuhkan	Dinas ESDM	25 Buah	39.938.000,00	**APBD**		19 Paket	15.884.000,00
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah tersediannya barang cetakan dan penggadaan	Provinsi Lampung	250.000 Lembar	46.000.000,00	**APBD**		460 Paket	46.000.000,00
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas ESDM	1 buku	0,00	**APBD**		0	0,00
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pengadaan ATK	Provinsi Lampung	2347 Buah	64.141.800,00	**APBD**		2347 Paket	168.432.000,00
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan minum	Dinas ESDM	415 kotak	25.600.000,00	**APBD**		415 Laporan	25.775.000,00
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi, Jumlah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	128 Kali	826.168.915,00	**APBD**		148 Laporan	936.506.400,00
3.29.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**14 Unit**	**355.737.200,00**	**APBD**		**100%**	**221.480.000,00**

3.29.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Provinsi Lampung	7 unit	118.821.200,00	**APBD**		31 unit	114.214.000,00
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Provinsi Lampung	7 unit	236.916.000,00	**APBD**		31 unit	107.266.000,00
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan**		**100%**	**679.021.400,00**	**APBD**		**100%**	**724.833.915,00**
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi Lampung	100%	224.262.000,00	**APBD**		12 laporan	197.558.915,00
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan administrasi keuangan dan Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Dinas ESDM	100%	454.759.400,00	**APBD**		36 laporan	527.275.000,00
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**55 Unit**	**1.070.105.000,00**	**APBD**		**55 Unit**	**561.505.000,00**
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		8 Unit	710.400.000,00	**APBD**		6 Unit	218.080.000,00
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		12 Bulan	32.545.000,00	**APBD**		88 unit	28.425.000,00
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		8 Unit	327.160.000,00	**APBD**		1 Unit	315.000.000,00
3.29.01.2	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian**		**100%**	**650.000.000,00**	**APBD**		**56,25%**	**600.000.000,00**
3.29.01.2.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**		**4 kab/kota**	**500.000.000,00**	**APBD**		**67,5%**	**480.000.000,00**
3.29.01.2.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Peningkatan Penyediaan Jumlah Data dan Informasi Konservasi Air Tanah Berbasis Cekungan	Provinsi Lampung	1 dokumen	150.000.000,00	**APBD**		20 Dokumen	261.500.000,00
3.29.01.2.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Peta Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Bandar Lampung	Provinsi Lampung	4 Lokasi	350.000.000,00	**APBD**		1 Dokumen	218.500.000,00

3.29.01.2.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**		**4 kab/kota**	**150.000.000,00**	**APBD**		**45%**	**120.000.000,00**
3.29.01.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan, serta terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah.	Provinsi Lampung	4 Lokasi	150.000.000,00	**APBD**		10 Laporan	120.000.000,00
3.29.01.3	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Mineral dan Batubara**		**100%**	**255.670.000,00**	**APBD**		**100%**	**519.110.000,00**
3.29.03.1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**		**7 dokumen**	**140.000.000,00**	**APBD**		**7 dokumen**	**140.000.000,00**
3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas	15 Kabupaten/ Kota	7 dokumen	140.000.000,00	**APBD**		7 dokumen	140.000.000,00
3.29.03.1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**	**Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**		**22 Perusahaan**	**115.670.000,00**	**APBD**		**22 Laporan**	**379.110.000,00**
3.29.03.1.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambanga n	10 Kabupaten	11 Perusahaan	57.390.000,00	**APBD**		11 Laporan	189.110.000,00

	Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri							
3.29.01.3.03. 04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Pengawasan Teknis kaidah Pertambanga n yang baik Perizinan Usaha Pertambanga n Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	10 Kabupaten	11 Perusahaan	58.280.000,00	**APBD**		11 Laporan	190.000.000,00
3.29.01.5	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Terbarukan**		**100%**	**1.907.790.000,00**	**APBD**		**100%**	**1.659.790.000,00**
3.29.01.5.03	**Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**	**Jumlah Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang tertatausahakan selama 1 Tahun**		**12 Bulan**	**357.000.000,00**	**APBD**		**8%**	**309.000.000,00**
3.29.01.5.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah koordinasi sektor migas yang dilaksanakan	Provinsi Lampung	12 Bulan	357.000.000,00	**APBD**		12 Laporan	309.000.000,00
3.29.01.5.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**		**100%**	**1.550.790.000,00**	**APBD**		**100%**	**1.350.790.000,00**
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	DaerahJumlah dokumen data guna penyusunan Neraca Energi	Provinsi Lampung	1 Dokumen	700.000.000,00	**APBD**		2 Dokumen	405.000.000,00

3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah dokumen data potensi bioenergi	Provinsi Lampung	1 Dokumen	800.000.000,00	**APBD**		40 Unit	795.000.000,00
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Jumlah fasilitas milik Pemerintah yang akan dilakukan efisiensi Energi Listrik	Provinsi Lampung	2 Unit	50.790.000,00	**APBD**		100%	150.790.000,00
3.29.01.6	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Ketenagalistrikan**		**100%**	**1.324.210.000,00**	**APBD**		**80%**	**1.174.210.000,00**
3.29.01.6.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**		**6 Kali**	**250.000.000,00**	**APBD**		**80%**	**250.000.000,00**
3.29.01.6.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan Usaha dan Infrastruktur Ketenagalistri kan	Provinsi Lampung	6 Kali	250.000.000,00	**APBD**		21 Laporan	250.000.000,00
3.29.01.6.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Penataan Izin Operasi selama 1 Tahun**		**12 Kali**	**100.000.000,00**	**APBD**		**80%**	**100.000.000,00**
3.29.01.6.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan K3L Usaha Ketenagalistri kan di Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	12 Kali	100.000.000,00	**APBD**		12 Laporan	100.000.000,00
3.29.01.6.05	**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri**	**Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun**		**7 dokumen**	**474.210.000,00**	**APBD**		**80%**	**474.210.000,00**

3.29.01.6.05.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah Dokumen Sub teknis urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas	15 Kabupaten/ Kota	7 dokumen	474.210.000,00	**APBD**		7 Laporan	474.210.000,00
3.29.01.6.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun**		**13 kab/kota**	**500.000.000,00**	**APBD**		**80%**	**350.000.000,00**
3.29.01.6.06.2	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Provinsi Lampung	13 kab/kota	150.000.000,00	**APBD**		0	0,00
3.29.01.6.06.4	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pravinsi Lampung	13 kab/kota	100.000.000,00	**APBD**		3 Laporan	100.000.000,00
3.29.01.6.06.7	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kabupaten di Provinsi lampung yang terdata untuk Dusun yang belum berlistrik serta Evaluasi Potensi Sumber EBT pada Dusun yang belum Berlistrik.	Provinsi Lampung	13 kab/kota	250.000.000,00	**APBD**		6 Dokumen	250.000.000,00
			Jumlah Pagu		**20.713.848.381,55**			**Jumlah Pagu**	**20.838.982.157,90**

BAB V
PENUTUP

Program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi saat ini yang diarahkan pada upaya mewujudkan ketahanan dan kemadirian energi menuju lampung berjaya.

Dengan adanya Renja Perubahan ini diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat memacu kinerja seluruh personil/pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, selain itu dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban terhadap tupoksi mengarah pada objektifitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2022 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Lampung,

Drs. HERY SADLI, M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19690719 199003 1 005